Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

Peran Mediasi Kinerja Realisasi Anggaran Belanja dalam Hubungan Otonomi Fiskal dan Ketergantungan Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris di Provinsi Kalimantan Timur

Andrye Theo Prathama, Titin Ruliana, Meiki Permana
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
mpermanaadenan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the mediating role of Budget Realization Performance in the relationship between Fiscal Autonomy and Transfer Dependence on Regional Economic Growth in East Kalimantan Province. Utilizing annual time-series secondary data from 2016 to 2025, this research employs Structural Equation Modeling (SEM-PLS) via WarpPLS 8.0 for model estimation and hypothesis testing. The results indicate that both Fiscal Autonomy and Transfer Dependence have a positive and significant influence on Budget Realization Performance (beta = 0.81, p < 0.01 and beta = 0.41, p = 0.05, respectively). However, Fiscal Autonomy does not exert a significant direct effect on Regional Economic Growth (beta = 0.10, p = 0.37). Budget Realization Performance acts as a full mediator (Full Mediation) in the relationship between Fiscal Autonomy and Economic Growth, with an indirect effect of 0.62 (p < 0.001), and as a partial mediator for Transfer Dependence (indirect effect of 0.270, p = 0.081). From an Islamic economics perspective, budget realization performance serves as the critical mechanism of Amanah (trust) and Stewardship (Khalifah) that transforms potential regional wealth into actual public welfare (Maslahah), preventing the hoarding of wealth (Ihtikar al-Mal) in the form of excessive unspent budget balances (SiLPA).

Keywords: *Fiscal Autonomy, Transfer Dependence, Budget Realization, Economic Growth.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran mediasi Kinerja Realisasi Anggaran Belanja dalam hubungan antara Otonomi Fiskal dan Ketergantungan Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan menggunakan data sekunder runut waktu (time series) tahunan dari tahun 2016 hingga 2025, penelitian ini menerapkan Structural Equation Modeling (SEM-PLS) melalui WarpPLS 8.0 untuk estimasi model dan pengujian hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Otonomi Fiskal dan Ketergantungan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (masing-masing beta = 0,81, p < 0,01 dan beta = 0,41, p = 0,05). Namun, Otonomi Fiskal terbukti tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (beta = 0,10, p = 0,37). Kinerja Realisasi Anggaran Belanja bertindak sebagai mediator penuh (Full Mediation) dalam hubungan antara Otonomi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi dengan efek tidak langsung sebesar 0,62 (p < 0,001), serta sebagai mediator parsial untuk Ketergantungan Transfer (efek tidak langsung sebesar 0,270, p = 0,081). Dalam perspektif ekonomi Islam, realisasi anggaran merupakan perwujudan Amanah dan Stewardship (Khalifah) yang mengubah potensi kekayaan daerah menjadi kemaslahatan

Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

publik (Maslahah) nyata, serta mencegah penumpukan harta (Ihtikar al-Mal) dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berlebihan.
Kata kunci: Otonomi Fiskal, Ketergantungan Transfer, Realisasi Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Sistem tata kelola pemerintahan dan administrasi publik di Indonesia telah mengalami transformasi paradigmatik yang sangat fundamental sejak runtuhnya era sentralisasi birokrasi, yang digantikan oleh era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Kebijakan ini dirancang secara normatif untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, mengoptimalkan penerimaan lokal, dan mengalokasikan anggaran belanja secara lebih taktis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka regulasi teranyar, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), secara tegas menggarisbawahi pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah yang diimbangi dengan efektivitas dan kualitas belanja daerah (Quality Spending). Dalam kaitan ini, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan krusial sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah.

Namun, bagi daerah-daerah yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) ekstraktif melimpah, penerapan desentralisasi fiskal menghadirkan anomali yang sangat problematik dan menantang kemapanan teori ekonomi makro tradisional. Fenomena ini tercermin secara nyata di Provinsi Kalimantan Timur, salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang perekonomiannya didominasi oleh sektor ekstraktif, khususnya batubara serta minyak dan gas bumi. Berdasarkan data historis, kelimpahan likuiditas fiskal daerah yang bersumber dari penerimaan otonom (PAD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari transfer pusat memicu kondisi patologis struktural yang diidentifikasi sebagai fenomena paradox of plenty (paradoks keberlimpahan) atau natural resource curse (kutukan sumber daya alam) (Rahma et al., 2019). Secara normatif, ketersediaan kas daerah yang melimpah diasumsikan akan memperluas ruang fiskal (fiscal space) daerah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi makro. Kenyataannya, tanpa serapan anggaran belanja publik yang responsif dan efektif, akumulasi pundi-pundi kas daerah tersebut gagal bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi riil yang inklusif.

Selain itu, memasuki dekade 2020-an, Provinsi Kalimantan Timur menghadapi momentum transformasi spasial dan struktural berskala masif seiring dengan penetapan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Kehadiran megaproyek nasional ini melipatgandakan kucuran dana transfer pusat (TKDD) ke Kaltim hingga menembus angka belasan triliun Rupiah pada tahun 2024. Kendati kapasitas likuiditas melonjak, birokrasi daerah terjebak dalam masalah klasik kapasitas eksekusi anggaran. Penyerapan anggaran yang lambat, menumpuk secara reaktif di penghujung tahun (termin invoice accumulation), serta tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mengendap pasif di rekening kas umum daerah

Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

(RKUD) mencerminkan patologi birokrasi yang kronis (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Kondisi ini menegaskan adanya 'mata rantai yang hilang' (missing link) antara kapasitas pendapatan daerah dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Oleh sebab itu, Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (Z) diposisikan sebagai variabel mediasi krusial untuk menjembatani pengaruh Otonomi Fiskal (X1) dan Ketergantungan Transfer (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (Y).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tujuh permasalahan pokok: 1) Apakah Otonomi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Realisasi Anggaran Belanja di Provinsi Kalimantan Timur? 2) Apakah Ketergantungan Transfer berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Realisasi Anggaran Belanja? 3) Apakah Otonomi Fiskal berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional? 4) Apakah Ketergantungan Transfer berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional? 5) Apakah Kinerja Realisasi Anggaran Belanja berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional? 6) Apakah Kinerja Realisasi Anggaran Belanja memediasi pengaruh Otonomi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional? 7) Apakah Kinerja Realisasi Anggaran Belanja memediasi pengaruh Ketergantungan Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris ketujuh hubungan kausal dan mediasi tersebut guna memberikan rekomendasi kebijakan bagi optimalisasi anggaran di Provinsi Kalimantan Timur.

TINJAUAN LITERATUR

Landasan teoretis desentralisasi fiskal berpijak pada Fiscal Federalism Theory yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972). Teori ini mengidentifikasi tiga fungsi utama pemerintah: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam sistem desentralisasi di Indonesia, fungsi alokasi diserahkan kepada daerah melalui instrumen otonomi fiskal (PAD) agar penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik sesuai dengan preferensi lokal (local preferences). Sementara itu, pemerintah pusat menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi melalui kucuran dana perimbangan guna mereduksi disparitas fiskal antardaerah.

Untuk menganalisis perilaku birokrasi dalam eksekusi fiskal, penelitian ini mengintegrasikan dua grand theory yang saling melengkapi, yaitu Agency Theory (Teori Keagenan) dan Stewardship Theory (Teori Kepengurusan). Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) mengasumsikan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pusat selaku principal dan daerah selaku agent. Dalam konteks transfer daerah, dana transfer yang tinggi (terutama DAK fisik) memicu pengawasan birokrasi yang kaku melalui petunjuk teknis (Juknis) dari kementerian. Hal ini memicu perilaku birokrasi yang reaktif dan lambat dalam menyerap anggaran karena takut akan sanksi administratif. Sebaliknya, Teori Stewardship (Donaldson & Davis, 1991) memandang birokrasi sebagai steward yang termotivasi oleh kepentingan kolektif publik. Otonomi fiskal (PAD) yang tinggi memperluas keleluasaan belanja daerah (expenditure discretion) tanpa ikatan rigid dari pusat, sehingga memicu

Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

perilaku stewardship untuk mengeksekusi anggaran secara lebih dinamis demi kepentingan pembangunan daerah.

Secara khusus, dalam khazanah Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, tata kelola keuangan publik harus selaras dengan konsep Amanah, Stewardship (Khalifah), dan Maslahah Ammah (kesejahteraan sosial) yang diturunkan dari Maqasid al-Shariah (Brahimi et al., 2025). Pemerintah bertindak selaku steward (khalifah) yang memegang amanah pengelolaan kekayaan publik yang bersumber dari kekayaan alam milik umat. Setiap Rupiah anggaran daerah wajib direalisasikan secara efisien untuk kemaslahatan bersama. Islam sangat melarang perilaku Ihtikar al-Mal atau penimbunan harta (hoarding of wealth). Dalam konteks APBD, dana triliunan rupiah yang mengendap pasif dalam bentuk SiLPA yang tidak terserap di bank merupakan representasi aset beku (idle assets) yang menunda realisasi maslahah publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip sirkulasi harta dalam ekonomi syariah yang mensyaratkan aliran kas produktif guna mendorong aktivitas ekonomi riil di masyarakat.

Berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu, dirumuskan tujuh hipotesis penelitian sebagai berikut: H1: Otonomi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Realisasi Anggaran Belanja. H2: Ketergantungan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Realisasi Anggaran Belanja. H3: Otonomi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. H4: Ketergantungan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. H5: Kinerja Realisasi Anggaran Belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. H6: Kinerja Realisasi Anggaran Belanja memediasi pengaruh Otonomi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. H7: Kinerja Realisasi Anggaran Belanja memediasi pengaruh Ketergantungan Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional.

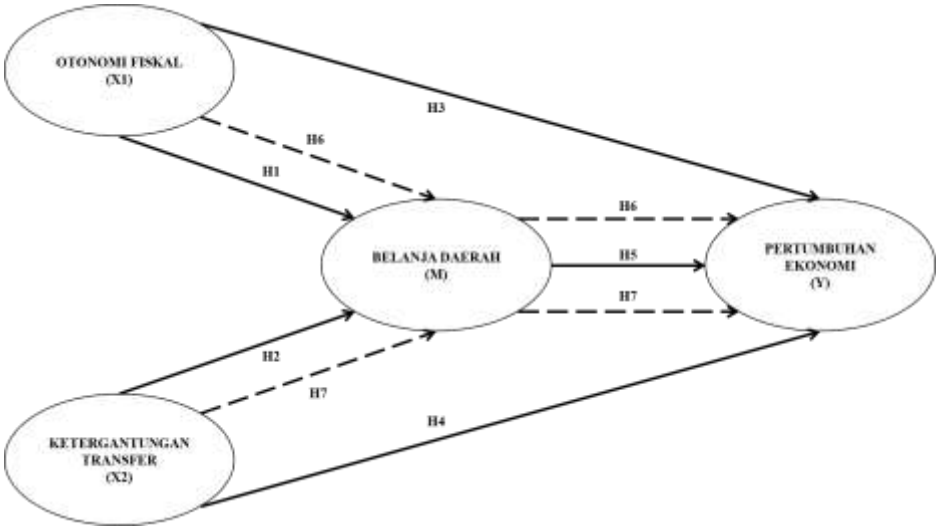
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (explanatory research) guna menguji hubungan kausalitas dan peran mediasi antarvariabel yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini bersifat tunggal (studi kasus makro), yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan periode pengamatan runut waktu (time series) tahunan selama 10 tahun anggaran (2016-2025). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus) di mana seluruh populasi data dalam rentang waktu observasi digunakan sebagai sampel (n = 10).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang diperoleh melalui studi dokumentasi resmi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Provinsi Kalimantan Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Pengunduhan data dilakukan melalui portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI (https://djpk.kemenkeu.go.id/).

Kerangka Konseptual dari penelitian sebagai berikut:

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Data diolah, 2026

Definisi operasional dan formula pengukuran masing-masing variabel dirinci sebagai berikut:

a. Otonomi Fiskal (X1): Diukur menggunakan proksi Rasio Otonomi Fiskal, yaitu persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah.
   Formula: (Total Realisasi PAD / Total Realisasi Pendapatan Daerah) x 100%
b. Ketergantungan Transfer (X2): Merepresentasikan porsi pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Untuk menghindari ketimpangan skala data dalam analisis multivariat, variabel ini dioperasionalisasikan menggunakan nilai logaritma natural (ln) dari total Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam satuan Rupiah.
c. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (Z): Merupakan variabel mediasi (intervening), diukur menggunakan proksi persentase realisasi penyerapan belanja terhadap pagu anggaran belanja daerah setelah perubahan (APBD-P).
   Formula: (Total Realisasi Belanja / Total Anggaran Belanja Perubahan) x 100%
d. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Y): Diukur menggunakan laju pertumbuhan (Year-on-Year) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Teknik analisis data diorkestrasi melalui metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Pemilihan metode ini didasarkan pada ketangguhannya (robustness) dalam menangani ukuran sampel kecil (n = 10) tanpa memerlukan asumsi normalitas data yang ketat (Kock, 2015). Prosedur resampling menggunakan algoritma Stable3 WarpPLS guna menstabilkan estimasi parameter statistik, terutama koefisien jalur (path coefficient, beta) dan tingkat signifikansi (p-value).

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pengujian model struktural, tabulasi data mentah hasil kompilasi dari LRA APBD Provinsi Kalimantan Timur dan PDRB ADHK disajikan dalam tabel di bawah ini. Penyajian data ini mencerminkan pergerakan postur anggaran dan indikator ekonomi Kaltim selama kurun waktu satu dekade.

Tabel 1. Data Operasional Penelitian Provinsi Kalimantan Timur (2016-2025)

Tahun	Otonomi Fiskal (X1) (%)	Total TKDD (X2) (Triliun Rp & ln)	Kinerja Realisasi Anggaran (Z) (%)	Pertumbuhan Ekonomi (Y) (%)
2016	50,46%	Rp3,95 Triliun (29,004)	68,50%	-0,38%
2017	56,25%	Rp3,54 Triliun (28,895)	101,59%	3,13%
2018	54,36%	Rp4,83 Triliun (29,206)	109,09%	2,64%
2019	55,68%	Rp5,19 Triliun (29,277)	106,73%	4,70%
2020	52,19%	Rp4,83 Triliun (29,206)	75,88%	-2,90%
2021	59,80%	Rp4,09 Triliun (29,041)	92,32%	2,55%
2022	53,54%	Rp7,79 Triliun (29,684)	107,76%	4,48%
2023	57,22%	Rp6,80 Triliun (29,548)	108,62%	6,22%
2024	46,92%	Rp11,70 Triliun (30,091)	98,98%	6,17%
2025	49,27%	Rp8,60 Triliun (29,783)	91,13%	4,53%

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

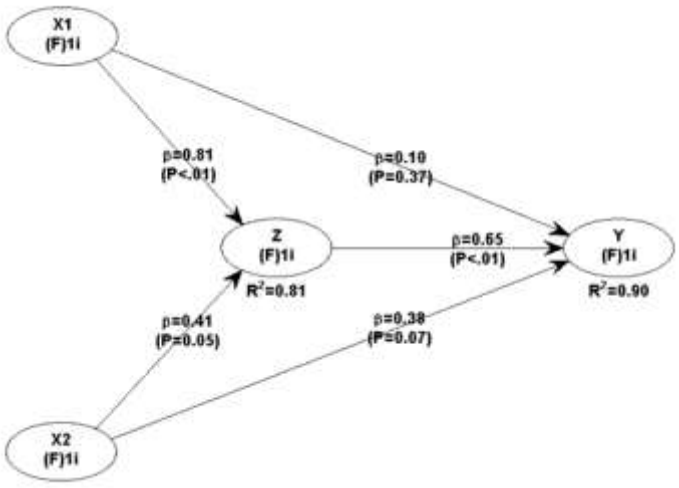
Tabel 1 menunjukkan dinamika fiskal dan ekonomi yang sangat kontras di Provinsi Kalimantan Timur. Selama periode 2016-2025, Otonomi Fiskal (X1) mencatatkan nilai rata-rata sebesar 53,55%, dengan pencapaian tertinggi sebesar 59,80% pada tahun 2021 dan terendah sebesar 46,92% pada tahun 2024. Penurunan

Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

otonomi fiskal pada tahun 2024 disebabkan oleh lonjakan drastis penerimaan dana transfer pusat (TKDD) yang mencapai Rp11,69 Triliun akibat implikasi pengembangan infrastruktur kawasan penyangga IKN. Sementara itu, Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (Z) berfluktuasi secara lebar dengan rata-rata 96,06%. Penyerapan terendah terjadi pada tahun 2016 (68,50%) akibat keterlambatan lelang dan tahun 2020 (75,88%) akibat realokasi dan refocusing anggaran penanganan krisis pandemi COVID-19. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Y) Kaltim menunjukkan rata-rata sebesar 3,11% per tahun, dengan rekor ekspansi tertinggi mencapai 6,22% pada tahun 2023 yang digerakkan oleh multiplier effect konstruksi fisik IKN.

Evaluasi Kelayakan Model (Model Fit & Measurement Model)

Hasil estimasi WarpPLS 8.0 menunjukkan bahwa seluruh indikator indeks kelayakan model memenuhi kriteria ekonometrika standar secara memuaskan. Average Path Coefficient (APC) tercatat sebesar 0,470 dengan tingkat signifikansi p = 0,013 (p < 0,05), mengonfirmasi keabsahan model jalur secara kolektif. Kekuatan prediksi model (predictive power) tergolong sangat kuat, ditunjukkan oleh nilai Average R-squared (ARS) sebesar 0,853 (p < 0,001) dan Average Adjusted R-squared (AARS) sebesar 0,800 (p < 0,001). Selain itu, model terbukti bebas dari kontaminasi multikolinieritas vertikal maupun lateral, dengan nilai Average block VIF (AVIF) sebesar 2,492 dan Average full collinearity VIF (AFVIF) sebesar 2,903, keduanya berada jauh di bawah nilai batas toleransi ketat 3,3. Indeks global Tenenhaus Goodness of Fit (GoF) menghasilkan nilai sebesar 0,812 (GoF > 0,36 dikategorikan sangat besar), memvalidasi keselarasan prima antara model struktural dengan data empiris. Terakhir, nilai Q-squared predictive relevance untuk Z (0,786) dan Y (0,910) yang berada jauh di atas nol menegaskan kapasitas prediksi model yang luar biasa.



Gambar 2. Hasil analisis
Sumber: Data diolah, 2026

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

Hasil Pengujian Hipotesis dan Analisis Jalur

Berdasarkan komputasi algoritma WarpPLS 8.0, koefisien jalur dan signifikansi masing-masing hubungan kausal langsung (Direct Effects) dan kausal tidak langsung (Indirect Effects) diringkas sebagai berikut:

a. Otonomi Fiskal terhadap Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (X1 -> Z): Memiliki koefisien jalur beta = 0,81 dengan nilai p < 0,01. Hipotesis H1 didukung kuat secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa kemandirian fiskal lokal memberikan diskresi bagi birokrasi daerah untuk mempercepat penyerapan belanja.
b. Ketergantungan Transfer terhadap Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (X2 -> Z): Memiliki koefisien jalur beta = 0,41 dengan nilai p = 0,05. Hipotesis H2 didukung. Ketergantungan transfer berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, mengonfirmasi tekanan regulasi bersyarat (earmarked constraints) yang memaksa daerah mengejar target penyerapan guna menghindari sanksi pemotongan DAK.
c. Otonomi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (X1 -> Y): Memiliki koefisien jalur beta = 0,10 dengan nilai p = 0,37. Hipotesis H3 ditolak secara mutlak. Artinya, kapasitas penerimaan otonom daerah tidak memiliki daya ungkit langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
d. Ketergantungan Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (X2 -> Y): Memiliki koefisien jalur beta = 0,38 dengan nilai p = 0,07 (tidak signifikan pada alpha 0,05). Hipotesis H4 ditolak.
e. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (Z -> Y): Memiliki koefisien jalur beta = 0,65 dengan nilai p < 0,01. Hipotesis H5 didukung secara sangat signifikan. Sektor riil ekonomi digerakkan secara nyata melalui eksekusi belanja publik daerah.
f. Peran Mediasi Z dalam hubungan X1 -> Y: Hasil komputasi efek tidak langsung (indirect path) menunjukkan koefisien mediasi sebesar 0,62 dengan nilai p < 0,001. Hipotesis H6 didukung secara sangat meyakinkan. Karena pengaruh langsung X1 -> Y tidak signifikan, Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (Z) terbukti bertindak sebagai Mediator Penuh (Full Mediation).
g. Peran Mediasi Z dalam hubungan X2 -> Y: Koefisien tidak langsung tercatat sebesar 0,270 dengan p = 0,081, menunjukkan mediasi parsial yang bersifat marginal dalam menjembatani transfer pusat menjadi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembahasan Integratif dan Perspektif Keuangan Publik Islam

Temuan empiris bahwa Otonomi Fiskal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (beta = 0,10, p = 0,37), melainkan harus melalui mediasi penuh Kinerja Realisasi Anggaran Belanja (beta tidak langsung = 0,62, p < 0,001), menyingkap tabir paradoks tata kelola keuangan di Provinsi Kalimantan Timur. Akumulasi kas daerah dari hasil pengerukan kekayaan alam (batubara, migas) tidak serta merta meningkatkan aggregates makroekonomi daerah jika dana tersebut hanya mengendap pasif di perbankan. Temuan ini memvalidasi

Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

postulat paradox of plenty dan kutukan otonomi fiskal (resource curse). Sifat mediasi penuh (Full Mediation) ini menegaskan bahwa tanpa keberadaan mesin penyerapan anggaran yang tangkas, responsif, dan bebas hambatan administratif, limpahan uang otonom senilai triliunan rupiah hanya akan berakhir sebagai fatamorgana pembukuan dan catatan statis neraca semu (Data Diolah, 2026).

Dalam lensa Stewardship Theory, otonomi fiskal yang tinggi mendorong birokrasi daerah bertindak sebagai steward yang berdedikasi karena memiliki keleluasaan penuh dalam menyusun program kerja lokal. Keleluasaan ini menjadi bahan bakar bagi peningkatan kinerja penyerapan anggaran (H1 didukung kuat). Sebaliknya, Ketergantungan Transfer yang tinggi memicu hubungan keagenan (Agency Theory) yang berbelit-belit. Untuk mengontrol agen (daerah), pemerintah pusat memberlakukan monitoring dan Juknis yang sangat ketat (earmarked grants). Akibatnya, eksekusi belanja yang bersumber dari dana transfer cenderung terlambat akibat kepanikan birokrasi terhadap ancaman penalti kementerian keuangan (Kementerian Keuangan, 2021). Perilaku birokrasi yang defensif ini menjelaskan mengapa mediasi realisasi belanja pada jalur transfer (H7) hanya berjalan secara marginal (p = 0,081).

Ketika ditarik ke dalam diskursus Ekonomi Islam, temuan ini memberikan justifikasi kuantitatif yang sangat solid mengenai esensi konsep Amanah dan larangan penimbunan harta (Ihtikar al-Mal). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertindak selaku Khalifah (Steward) yang memegang mandat kepercayaan dari Allah SWT dan masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan daerah demi kesejahteraan bersama (Maslahah Ammah). Tingginya SiLPA yang terjadi secara berulang setiap tahun anggaran mencerminkan belum optimalnya penyerapan amanah fiskal. Dalam pandangan hukum syariah, mengendapkan triliunan Rupiah dana publik di bank sementara masyarakat lapis bawah sangat membutuhkan pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan perbaikan pendidikan merupakan penundaan maslahah yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, percepatan realisasi belanja (khususnya belanja modal produktif) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen ibadah sosial untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah (Maqasid al-Shariah) dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan teoretis mengenai pengelolaan keuangan makro Provinsi Kalimantan Timur periode 2016-2025, ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Realisasi Anggaran Belanja bertindak sebagai Mediator Penuh (Full Mediation) yang sangat krusial dalam menghubungkan Otonomi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Kapasitas kemandirian keuangan daerah (PAD) yang melimpah terbukti sama sekali tidak berdampak langsung terhadap kemajuan ekonomi riil tanpa adanya realisasi belanja yang efektif. Sementara itu, Ketergantungan Transfer berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran akibat tuntutan kepatuhan regulasi pusat yang ketat, namun mediasi realisasi belanja pada jalur transfer pusat ini berjalan secara marginal. Hasil pengujian ini mengonfirmasi kebenaran integrasi Teori Stewardship, Teori Keagenan, serta prinsip-prinsip

Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

ekonomi syariah, di mana realisasi anggaran yang tangkas merupakan representasi pelaksanaan Amanah publik guna mentransformasi kekayaan daerah menjadi Maslahah Ammah serta mengeliminasi patologi penumpukan aset menganggur.

Saran strategis yang direkomendasikan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi restrukturisasi birokrasi dan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa. Fenomena kemacetan penyerapan dana di akhir tahun harus dieliminasi secara radikal melalui penerapan lelang dini (tender sebelum Dokumen Pelaksanaan Anggaran final diketuk) agar belanja modal tidak dikerjakan secara reaktif. Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan pergeseran kualitas alokasi anggaran (Quality Spending) dengan mengurangi porsi belanja aparatur yang bersifat konsumtif-birokratis, dialihkan kepada belanja modal produktif padat karya seperti infrastruktur hilirisasi sektor non-tambang dan konektivitas kawasan penyangga IKN. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan arsitektur penelitian menggunakan Arsitektur Data Panel (Panel Data) yang mencakup 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur guna memotret disparitas spasial dan menambahkan variabel makro eksternal seperti tingkat inflasi dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk meminimalisasi bias model di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173

Brahimi, M., & others. (2025). Fiscal Decentralization, Expenditure Autonomy as the Mediating Mechanism and Economic Growth: Maqasid Syariah Perspective. JIAKES (Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan), 13(1), 45-58.

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kock, N. (2015). One-tailed or two-tailed P values in PLS-SEM? International Journal of E-Collaboration (IJeC), 11(2), 1-7. https://doi.org/10.4018/ijec.2015040101

Kementerian Keuangan. (2021). Buku Pintar Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Maghfiroh, T., Warno, W., & others. (2024). The impact of regional original income and balance funds on local government financial performance: an Islamic perspective in Central Java, Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 6(1), 72-88.

Vol 8 No 11 (2026) 5112 – 5122 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13502

Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. New York: McGraw-Hill.

Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Rahma, H., & others. (2019). Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Mekanisme Transmisi Fenomena Natural Resource Curse di Kalimantan Timur. Jakarta: Auriga Nusantara.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tarjo, T., & Riskiyadi, M. (2022). Revealing the fraud at the end of the fiscal year at local government agencies in Indonesia. International Journal of Public Sector Performance Management, 9(3), 255-271. https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.123456

Todaro, M. P. (1999). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.